

Bahasa Politik: Objek Studi Kritis Penelitian Bahasa

Dadang S. Anshori
Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak

Tulisan ini hendak memaparkan pendekatan kritis dalam penelitian bahasa. Pendekatan kritis sesungguhnya merupakan kritik teori terhadap teori-teori yang terlebih dahulu mapan dan banyak dipakai para peneliti dalam kurun waktu yang cukup lama. Pendekatan kritis tergolong jenis penelitian kualitatif yang bersifat subjektif, artinya peneliti terlibat langsung dan bergabung dengan objek penelitian tersebut. Dengan mengkaji bahasa politik, tulisan ini hendak menunjukkan bahwa bahasa politik merupakan kajian menarik untuk didekati melalui pintu pendekatan kritis ini.

Kata Kunci: pendekatan kritis, bahasa politik, objektif-subjektif

Pendahuluan

Penelitian bahasa mengalami perkembangan yang pesat. Paradigma positivisme telah memberikan sumbangan yang besar dalam penelitian bahasa. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jenis penelitian yang menggunakan basis data kuantitatif sebagai pendekatan dan metodologi penelitian. Sebagai sebuah penelitian kuantitatif, penelitian bahasa dilakukan dalam kerangka menjawab hipotesis (H_0 atau H_1). Penelitian demikian cenderung mensyaratkan judul-judul yang bervariasi lebih dari satu, yakni variabel bebas (x) dan variabel terikat (y). Hal terpenting apa yang ada dalam jenis penelitian ini? Penelitian ini menempatkan objek penelitian sebagai objek yang pasif. Teori-teori strukturalisme fungsionalisme dalam ilmu sosial, misalnya, menempatkan manusia sebagai objek pasif. Ketika seorang peneliti melakukan penelitian tentang perilaku manusia, berdasarkan pendekatan positivisme, manusia dianggap sebagai objek pasif, sehingga perilaku manusia bisa diangkakan (kuantifikasi). Demikian halnya dengan perilaku bahasa manusia, diteliti melalui instrumen penelitian yang tidak terlalu peduli validitas data yang diberikan objek penelitian. Bahkan peneliti tidak pernah mengetahui secara langsung objek penelitiannya.

Sejak lahirnya paradigma baru dalam penelitian, yakni postpositivisme dengan model pendekatan kualitatif, khazanah penelitian bahasa pun bertambah. Kini mulai dikembangkan teori-teori baru yang secara internal dalam ilmu bahasa maupun teori-teori yang lahir dari perpaduan dengan ilmu-ilmu lainnya. Dalam ilmu komunikasi misalnya dikembangkan teori-teori analisis wacana, stilistika, semiotik, dramaturgi, yang merupakan teori-teori sastra dan bahasa, di samping teori-teori sosial teori dan teori-teori psikologi. Teori-teori ini biasanya dijadikan alat untuk mengkaji teks media. Sayangnya, teori-teori itu, dalam dunia sastra dan bahasa, masih sangat terbatas. Teori-teori yang dikembangkan dalam penelitian mahasiswa (skripsi) misalnya, belum dijadikan alat dalam menganalisis masalah, baru sebatas legitimasi persoalan yang hendak diteliti.

Paradigma postpositivisme menempatkan objek penelitian sebagai sesuatu atau benda yang aktif. Penelitian berparadigma postpositivisme biasanya disebut dengan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini menghendaki keterlibatan langsung peneliti di lapangan dan mengenal secara baik objek penelitiannya. Penelitian kualitatif yang lebih

bersifat subjektif, menempatkan objek penelitian dalam perspektif apa adanya (dalam bentuk kasus-kasus, bersifat fenomenologis). Dengan demikian, aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian akan secara komprehensif diteliti oleh sang peneliti.

Kini berkembang pula jenis penelitian tindakan (*action research*) yang diperkenalkan Kurt Lewin (1946). *Action research* merupakan bagian dari paradigma postpositifis atau penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini pun mensyaratkan keterlibatan langsung peneliti bersama objek penelitian. Dalam dunia pendidikan, penelitian tindakan (kelas) diperlukan dalam kerangka merefleksi, mengevaluasi, dan menemukan teknik-teknik pengajaran suatu mata kuliah. Perhatikan misalnya penjelasan tentang penelitian tindakan menurut Kemmis dan McTaggart (1988a) sebagaimana dikutip Webb (dalam Skirrit 1996:5):

“Action reseach is a form of collective self-reflective enquiry undertaken by participants in social situations in order to improve the rationality and justice of their own social or education practices, as well as their understanding of these practices and the situations in which thes practices are carried out... The approach is only action research when it is collaborative, though it is important to realize that the action research of the group is achieved through the critically examined action of individual group members (5-6)”

Action research dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Kegiatan-kegiatan ini bisa bersifat spiral, misalnya, dimulai dari refleksi bukan dari perencanaan. Sebagai sebuah penelitian kualitatif, peneliti dapat merumuskan masalah setelah masuk dalam “medan penelitian”. Bahkan penelitian ini bukan lagi dalam rangka menjawab hipotesis, melainkan bisa dalam rangka melahirkan hipotesis.

Berbagai pendekatan penelitian di atas mengharuskan kita lebih membuka pemahaman bahwa pendekatan atau metodologi penelitian hanyalah alat yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengungkap masalah yang hendak ditelitinya. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan Deddy Mulyana (2001), keterikatan kita terhadap salah satu perspektif dalam mengkaji ilmu sosial, hanya membuat disiplin ilmu yang dikaji mengalami kemandekan dan *in-breeding*. Persoalan pendekatan ini harus dilihat dari sisi kebermanfaatannya bagi sebuah penelitian. Oleh karena itu, sangat tidak layak terjadi perdebatan untuk memperebutkan “keabsahan” di antara kedua jenis penelitian ini. Bahkan, sebagai sebuah jalan, keduanya bisa dipergunakan untuk melakukan penelitian yang menghendaki kedua pendekatan penelitian tersebut.

Teori Kritis dalam Penelitian

Posmodernisme telah melahirkan berbagai paradigma dalam penelitian, seperti fungsionalisme, interpretif, poststruktural, dan kritis (Kemmis, dalam Skirrit, 1996:1999). Aliran kritis merupakan “perlawanan aliran empiris” (bisa disebut subjektif versus objektif) berkembang di Jerman, sehingga aliran ini disebut Mazhab Frankfurt dengan tokoh-tokohnya seperti Adorno, Horkheimer, Benjamin, dan Marcuse. Melalui Habermas yang merupakan murid Horkheimer dan Adorno, teori ini menjadi semarak dalam penelitian, khususnya ilmu-ilmu sosial.

Salah satu pemikiran Habermas dijelaskan Webb (dalam Skirrit, 1996:143) sebagai berikut:

“... He claims that the point of speech is to communicate, to test counter positions and to gain understanding. In an ‘ideal speech situation’ each person is equally empowered to speak, there is no coercion from outside the conversation or between the discussants, and it is the power of the argument rather than the power of a particular person which carries the day. The very point of language in making it possible for communication to take place is underlaid by the idea of the ‘ideal speech situation’, which in turn is the model for a rational society and, interestingly, for science too. The ideal speech situation lies at the base of all communication and the conditions which come closest to the ideal at this microcosmic level provide the blueprint for a just and rational society....”

Teori kritis bersifat normatif; menentang kebebasan nilai dan penyempitan realitas sosial pada penelitian yang positivisme-empirik. Realitas sosial harus didekati dengan emansipasi manusia, diteliti dengan teori yang luas, tidak terpisah-pisah di antara ilmu, politik, dan filsafat (Hollander dalam Effendi, 2000:405).

Patti Lather menyebutkan bahwa penelitian kritis termasuk ke dalam pendekatan era postpositif, yang mencari makna di balik yang empirik, dan menolak *valuefree*. Pendekatan kritis mempunyai komitmen yang tinggi pada tata sosial yang lebih adil. Dua asumsi dasar yang menjadi landasan, yaitu 1) ilmu sosial bukan sekadar memahami ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan distribusi *resources*, melainkan berupaya membantu menciptakan kesamaan dan emansipasi dalam kehidupan; 2) pendekatan kritis memiliki keterikatan moral untuk mengkritik *status quo* dan membangun masyarakat yang lebih adil (Muhajir, 2000:197).

Teori kritis memberikan dampak dalam ilmu bahasa bahwa bahasa harus dipelajari dalam konteks sosial agar dapat diperoleh latar belakang historis-ekonomis-politis bagi fenomena bahasa. Pendekatan kritis sebenarnya merupakan suatu *kritik teori* terhadap teori-teori empiris yang sudah terlebih dahulu mapan. Bahasa harus dipelajari dalam kerangka filosofis dan maknawi. Oleh karena itu, peneliti harus terlibat langsung dalam proses penelitian dan melibatkan diri secara langsung dengan objek penelitian. Untuk bisa meneliti realitas bahasa masyarakat, diperlukan kesanggupan peneliti untuk terjun langsung ke masyarakat mencari objek, mewawancarinya secara mendalam atau bahkan hidup bersamanya dalam rangka mendapatkan data sesungguhnya. Dengan demikian, penelitian ini menembus persoalan-persoalan “dalam” objek penelitian.

Secara ontologis, epistemologis, aksiologis dan metodologis, penelitian kritis berbeda dengan paradigma klasik (positivisme) dan paradigma konstruktivisme. Secara ontologis, realitas yang teramati (*virtual reality*) merupakan realitas “semu” yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi politik. Secara epistemologis dijelaskan bahwa hubungan antara peneliti dengan realitas yang diteliti selalu dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Pemahaman tentang sesuatu realitas merupakan *value mediated findings*. Secara aksiologis bisa dijelaskan bahwa 1) nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu penelitian; 2) peneliti menempatkan diri sebagai *transformative intellectual*, advokat, dan aktivis; 3) tujuan penelitian, yaitu kritik sosial, transformasi, emansipasi, dan *social empowerment*. Secara metodologis, penelitian kritis: 1) Mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual, dan multilevel analisis yang bisa dilakukan melalui penempaan diri sebagai aktifis/partisipan dalam proses transformasi sosial; 2) Kriteria kualitas penelitian adalah

historical situatedness, yakni sejauh mana penelitian memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik (Hidayat, 2000:4).

Bahasa Politik: Sebuah Hegemoni

Berbahasa adalah bertata bahasa. Kemerdekaan berbahasa adalah kemerdekaan untuk mengikuti aturan-aturan bahasa yang telah disepakati para pemakai bahasa. Berpolitik bahasa adalah bertata politik. Kemerdekaan politik adalah kemerdekaan menghormati dan mengikuti aturan-aturan politik yang telah disepakati oleh para pelaku politik. Dengan demikian, politisasi bahasa adalah rekayasa menggunakan bahasa, memberlakukan aturan bahasa, dan memaksa pemaknaan bahasa. Bahasa dengan demikian, “dibermaknakan” sesuai dengan konteks politik penguasa (Alwasilah, 1994).

Politisasi bahasa memang sudah menjadi karakter dari penggunaan bahasa kekuasaan Orde Baru. Penguasa Orde Baru telah menjadikan bahasa sebagai subordinat dari kekuasaan politik yang tercermin dalam pembangunan. Bahasa telah direkayasa sebagai komoditas politik demi kepentingan kelompok-kelompok dominan. Munculnya istilah-istilah yang secara makna dikudeta oleh para penguasa Orde Baru telah mengubah pandangan dan cara berpikir masyarakat Indonesia yang menjadi subjek bahasa. Kata “rawan pangan” berbeda makna dengan “kelaparan” karena dalam pikiran kita tidak pernah hadir bayangan orang-orang yang kelaparan karena tidak ada yang bisa dimakan. Demikian pula kata “demi nusa dan bangsa” atau “demi persatuan” dieksploitasi untuk kepentingan politik agar kita tidak berpikir kritis.

Hooker (dalam Latif dan Ibrahim, ed. 1996:72) melakukan penelitian terhadap teks-teks pidato Hari Kemerdekaan di masa Orde Lama dan Orde Baru, dengan menggunakan teori Halliday (1995). Teori ini berupa kerangka kerja untuk memungkinkan kita mengetahui interaksi teks dengan konteks, yang meliputi tiga bagian konsep: wilayah wacana (*field of discourse*), penyampaian wacana (*tenor of discourse*), dan mode wacana (*mode of discourse*). Hasil penelitian Hooker sebagai berikut:

Perbandingan Pidato-pidato Hari Kemerdekaan Orde Lama dan Orde Baru

Aspek	Orde Lama	Orde Baru
Bidang/Wilayah	Komentar dan apologi Rumusan umum Bisa ditawarkan Waktu: Jauh dari masa lalu Masa lalu	Tinjauan dan rencana mendatang Rumusan detil Tak bisa ditawarkan Waktu: Sekarang Mendatang
Tenor	Dialog Kerangka rujukan pembicara: kita, saya, Bung Karno, Presiden Soekarno	Monolog Kerangka rujukan pembicara: kita, pada umumnya saya
Cara/Mode	Pribadi, emosional, perpaduan formal dan informal, empati, eksistensi, acak	Impersonal, bahasa yang sederhana, formal, berwibawa, terencana, terarah, berulang- ulang

Menurut Lewuk (1995:186) terdapat empat kategorisasi ideologi kebahasaan yang dipergunakan oleh kelompok kekuasaan. Keempat kategori tersebut, yaitu bahasa berdimensi satu, *orwellianisme* bahasa, jaringan bahasa takut-takut, dan bahasa yang menyembunyikan pikiran. Bahasa berdimensi satu menuntut orang yang menyatakan sikap dan pernyataan yang sama (satu), sesuai dengan kemauan penguasa. Di sini tidak ditemukan “logika protes”, seperti halnya tidak ada tempat bagi para oposisi di masa Orde Baru. Pemikiran “dialektis-negatif.” digantikan dengan pemikiran “positif” yang hanya mengafirmasikan dan menyesuaikan diri dengan realitas. Di masa Orde Baru setiap pemikiran harus relevan dan tidak boleh berbeda dengan konsep pembangunan. Bagi mereka yang anti-pembangunan, penguasa menyebut dengan “anti pembangunan” atau “anti-Pancasila”.

Orwellianisme bahasa dalam konteks ini adalah teknik penyatuan dua pengertian yang sebenarnya bertentangan, sehingga perbedaan antara yang benar dengan yang salah menjadi kabur. Ungkapan-ungkapan tentang kebebasan mengeluarkan pendapat, diartikan sebagai kepatuhan terhadap instruksi yang dikeluarkan pihak penguasa. Untuk menunjukkan “sikap demokratis”, dipakai istilah “kritik konstruktif” atau “kritik membangun” yang maknanya setiap kritik tidak boleh menyinggung kebijakan dan tidak boleh bertentangan dengan kehendak kekuasaan. Dalam dunia pers, untuk menghindari konflik dengan kekuasaan, pers melakukan kritik melalui “karikatur” dan “pojok”. Keduanya menyampaikan kritik melalui humor, dan ternyata efektif pada masa itu, terbukti tidak ada pers yang dibredel karena kritik “karikatur” atau kritik “pojok”.

Bahasa takut-takut adalah bahasa yang diucapkan masyarakat yang memiliki kepanutan monoloyalitas terhadap berbagai instruksi yang dilambungkan melalui simbol bahasa. Pada saat Pemilu, kita mendengar “Golput haram” atau “Golput berarti tidak bertanggung jawab terhadap demokrasi”. Munculnya kepanutan-kepanutan yang dipaksakan karena terjadi “hukum bahasa” bagi orang yang melanggarnya. Pada era reformasi, muncul istilah “anti reformasi” atau “Orba” bagi mereka yang tidak setuju terhadap pemisahan kota/kabupaten.

Terakhir, bahasa menyembunyikan pikiran, artinya bahasa bukan lagi sebagai alat menyatakan pikiran. Di balik pikiran itu terdapat kepentingan yang memanipulasi bahasa itu sendiri. Kita bisa menyaksikan model bahasa yang terakhir ini di saat kampanye Pemilu. Idiom-idiom yang berupa janji-janji partai dengan mudah bertebaran dilontarkan oleh partai politik hanya untuk memanipulasi rakyat yang awam politik. Jenis bahasa terakhir ini termasuk di dalamnya bahasa-bahasa propaganda. Bahasa-bahasa propaganda ditebar untuk menyiarkan kebencian (*warmongering*). Propaganda dilakukan dalam rangka pembusukan nama baik orang lain (*defamatory*). Propaganda juga dilakukan untuk membakar permusuhan dan konflik dalam masyarakat (*subversive*). Propaganda bisa berbentuk perang urat saraf berupa perang media dan memanipulasi fakta-fakta (*psychological warfare*). Kalimat “Perang Irak untuk membebaskan rakyat Irak dari cengkraman diktator Saddam Husein” merupakan bentuk propaganda urat saraf yang dilakukan Amerika untuk mengibuli dunia dan rakyat Irak.

Bahasa politik merupakan bahasa yang dipergunakan para elite politik dan elite birokrasi untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan kekuasaan. Berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta di lapangan, bahasa politik akan bercirikan: 1) terjadinya politisasi makna atas bahasa-bahasa yang dipergunakannya; 2) terjadi penghalusan makna, dalam

bentuk *eufimisme* bahasa yang dalam terminologi Mochtar Lubis sebagai sebuah “penyempitan makna”. Fenomena *eufimisme*, misalnya, kata “serangan bersahabat” untuk mengatakan “salah sasaran” yang terjadi antarsesama tentara gabungan pada perang Irak. Mungkinkah antarsahabat saling menyerang?; dan 3) terjadinya bentuk-bentuk bahasa propaganda dalam rangka meyakinkan pihak lain, terutama masyarakat. Propaganda yang paling “berbahaya” adalah bahasa-bahasa agitasi (menebar permusuhan) dan bahasa-bahasa rumor (tidak jelas sumber beritanya).

Nurudin (2001), misalnya, menunjukkan penggunaan bahasa-bahasa propaganda pada tiga masa pemerintahan, yakni era Soeharto, B.J. Habibie, dan Abdurrahman Wahid, Pada era Soeharto terbentuk propaganda pembangunan yang berpusat pada ekonomi, sakralisasi Pancasila dan UUD 45, propaganda asas tunggal, dan propaganda politisasi agama. Pada masa Orde Baru, terjadi satu sikap monoloyalitas dalam berbahasa sebagai cermin “kesebatunggalan” pemahaman terhadap realitas. Sikap akomodasi yang disampaikan para cendekia juga tercermin dari bahasa dan slogan yang dipakainya. Dalam konteks ini, slogan *Islam yes, politik Islam no* yang banyak disebut oleh Nurcholish Madjid merupakan salah satu contoh bahasa “kesepakatan’ terhadap realitas.

Manusia yang hidup selama 32 tahun di bawah zaman Orba, menurut Jalaluddin Rakhmat (1999:142) memiliki karakteristik yang khas dan terbiasa untuk berpikir “berkelok-kelok” karena di satu sisi ingin disebut kritis oleh publik, namun di sisi lain tidak hendak “berhadapan” dengan kekuasaan atau melakukan politik akomodasi dengan penguasa Orde Baru supaya tetap *survive* atau istilah psikologinya *ego defense mechanism* (mekanisme pertahanan ego). Sosok manusia Orba ini oleh Jalaluddin Rakhmat disebut dengan nama “Homo Orbaicus”. Model manusia “Orbaicus” ini terjadi karena terlalu lamanya kontrol berpikir lewat penataran P4 sejak SD, SLTP, SMU, hingga PT.

B.J. Habibie melakukan propaganda moral *altruisme*, misalnya ketika B.J. Habibie memutuskan memberikan opsi II tentang memorandum bagi rakyat Timor Timur. Sebagaimana sering disebutkan B.J. Habibie opsi memorandum dilakukan dalam rangka menegakkan hak azasi dan demokratisasi. Demokrasi ditempatkan sebagai tema sentral dalam setiap pidato B.J. Habibie; sesuatu yang bertolak belakang dengan pidato-pidato pemerintahan Soeharto. Di lain pihak, B.J. Habibie juga melakukan propaganda *pseudo demokrasi* (demokrasi pura-pura) melalui berbagai bentuk kebebasan berpendapat, namun dia tidak mampu menyentuh penegakkan hukum secara adil, terutama yang melibatkan “guru besarnya”: Presiden Soeharto. Dengan kata lain, kebebasan pers yang digaungkannya, termasuk di dalamnya kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berpolitik (multi partai) merupakan wujud propaganda-propaganda yang dilakukan B.J. Habibie.

Abdurrahman Wahid, menurut Nurudin (2001), telah menggunakan *language politic* untuk kepentingan propaganda. Gus Dur sering melontarkan masalah-masalah yang penuh interpretasi sehingga muncul wacana-wacana dan ketika wacana itu sudah klimaks, Gus Dur hanya mengucap, “*Gitu aja kok repot*”, suatu ungkapan yang tidak jelas maksudnya: hanya Gus Dur yang paham maknanya. Gus Dur juga melakukan propaganda “fiqh politik” dengan mengganti *assalamualaikum* dengan “selamat pagi”. Demikian pula, ketika Gus Dur melontarkan ide negara tanpa tentara, pencabutan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan komunis. Namun, tak kalah pentingnya

adalah propaganda “tunjuk hidung” dalam kasus-kasus yang melibatkan pihak lain, yang aliran politiknya berseberangan dengan Gus Dur.

Bahasa politik dipergunakan para penguasa untuk mempengaruhi pihak lain. Bahasa politik dipergunakan dalam kampanye-kampanye partai politik atau pidato-pidato para birokrat. Sebelum B.J. Habibie menjadi Menristek di era Orde Baru, kata-kata *Iptek* atau *Imtak* kurang populer di masyarakat. Kedua kata itu menjadi sangat akrab ketika secara terus-menerus disosialisasikan dan diprogramkan melalui berbagai rekayasa. Akhirnya, terjadilah perubahan cara pandang masyarakat kita akan pentingnya teknologi. Untuk mengakomodasi kultur religi masyarakat Indonesia, maka segala hal yang berbaur teknologi selalu diekori dengan iman dan takwa. Lahirlah pandangan teknologi berbasis agama (moral) landasan pembangunan masa depan bangsa ini. Bahasa dalam konteks ini telah secara efektif mempengaruhi publik (khalayak) sehingga benar-benar terjadi perubahan pandangan, sikap, dan perbuatannya.

Bahasa politik merupakan bahasa hegemoni. Istilah hegemoni diletakkan oleh Gramsci di saat mendekam di penjara Prancis. Teori ini menjelaskan mengapa revolusi sosialis tidak terjadi di negara Barat yang dianggap demokratis. Hegemoni dipergunakan untuk menunjukkan adanya kelas dominan yang mengarahkan –tidak hanya mengatur— masyarakat melalui pemaksaan kepemimpinan moral dan intelektual (Storey, 2003:172). Hegemoni di atur oleh mereka yang oleh Gramsci disebut “intelektual organik”. Mereka adalah tokoh moral dan intelektual yang secara dominan menentukan arah konflik, politik, dan wacana yang berkembang di masyarakat. Mereka bekerja untuk melanggengkan kekuasaan atas kelompok yang lemah. Dominasi “intelektual organik” diwujudkan melalui rekayasa bahasa sebagai sebuah kekuasaan. Melalui berbagai media bahasa ditunjukkan hadirnya kekuasaan dan pengaturan hegemoni tersebut. Berbagai kebijakan negara, misalnya, disampaikan dalam bahasa “untuk kepentingan bangsa di masa mendatang” atau “demi kemandirian bangsa” telah menghegemoni masyarakat untuk senantiasa menerima berbagai keputusan negara, yang merugikan sekalipun.

Sebagai kekuatan hegemoni, bahasa politik telah menjadi sangat mudah diatur untuk kepentingan-kepentingan pihak kelas dominan. Bahasa-bahasa hegemoni juga telah mengkontruksi pikiran masyarakat kelas lemah untuk senantiasa bergantung dan menerima tanpa kritik. Hal ini terjadi secara alamiah, luput dari perhatian masyarakat yang terhegemoni. Bayangkan, untuk atas nama sebuah simbol-simbol partai, masyarakat saling bertikai di saat Pemilu. Simbol-simbol inilah ternyata yang menyebabkan orang merasa eksis dan hadir.

Hegemoni bahasa juga dapat kita saksikan dalam bahasa-bahasa media, baik cetak maupun elektronik. Pada Pemilu 1999, masyarakat kita sangat akrab dengan kampanye Gus Dur, “maju tak gentar membela yang benar” atau “Golkar barunya” Akbar Tanjung. Demikian pula, ketika pertanggungjawaban B.J. Habibie ditolak, kelompok dominan menghegemoni publik bahwa BJ Habibie adalah “anak kandung” Orde Baru. Kata-kata itu menjadi sangat sakti ketika berubah wujud menjadi opini publik. Media menggunakan bahasa sebagai alat untuk mempengaruhi khalayak. Perhatikan misalnya pengakuan Kress (1984: 121) tentang keberperanan bahasa dalam sebuah pemberitaan di media.

“The reports and my attempts to ‘read’ them, to reconstruct the original event, involve language. Essentially, they are linguistic entities, though neither the causes nor the attendant events may have been linguistic. The reports exist only in and through language; my attempts to read them depend entirely on language. Indeed

the schemata may exist only in language, or at least, become public and articulate only in and through language.”

Teori hegemoni tentulah hanya salah satu teori yang bisa dipakai untuk membedah bahasa politik, sebagaimana teori Halliday untuk meneliti bahasa politik Orde Baru dan Orde Lama. Bahasa politik juga bisa dihampiri oleh analisis wacana (*discourse analysis*) atau analisis semantik (*semantic analysis*). Kedua pendekatan ini malah sudah marak dipakai dalam penelitian ilmu sosial, terutama ilmu komunikasi. Tentu ilmu bahasa adalah bidang yang paling kompeten untuk menjelaskan keduanya.

Simpulan

Paparan di atas memberikan gambaran bahwa objek-objek penelitian, seperti bahasa politik merupakan objek yang menarik untuk dikaji secara kritis. Hal serupa untuk penelitian-penelitian bahasa yang sifatnya tekstual. Dalam masyarakat terdapat realitas-realitas bahasa yang harus dihampiri secara kritis tidak dengan pendekatan struktural. Pendekatan ini tidak akan cukup mampu mengungkap makna dibalik fenomena bahasa. Terlebih, pendekatan kritis mensyaratkan terjadinya interdisipliner dalam melakukan penelitian. Bagaimanapun untuk menggali “ideologi” yang tersimpan dibalik simbol-simbol bahasa, seorang peneliti harus secara intens dan komprehensif terlibat dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, hanya pendekatan-pendekatan kritislah yang mampu menjawab semua itu.

Yang ingin ditunjukkan dari uraian di atas adalah bahwa sangat banyak “makna-makna dalam” dibandingkan simbol-simbol luar bahasa, karena bahasa sudah masuk pada wilayah-wilayah nonlinguistik. Bahasa tidak hanya sebagai bahasa, tetapi telah berubah sesuai keberfungsian dan kebermaknaan pemakaiannya. Dalam bahasa politik, keberfungsian dan kebermaknaan itu tampak secara terang. Bahasa menyimpan kepentingan-kepentingan di luar sebagai simbol komunikasi manusia. Hal ini merupakan wilayah kebahasaan yang sangat menarik untuk diteliti.

Pustaka Rujukan

- Alwasilah, A. Chaedar. (1994). “Bahasa dan Kemerdekaan”. Artikel *Kompas*, 29 Agustus 1994.
- Hidayat, Dedy N. (1999). *Paradigma dan Perkembangan Penelitian Komunikasi*. Jurnal ISKI Vol III/April 1999.
- Hooker, Virginia Matheson. (1996). “Bahasa dan Pergeseran Kekuasaan di Indonesia: Sorotan Terhadap Pembakuan Bahasa Orde Baru” dalam *Bahasa dan Kekuasaan, Politik Wacana di Panggung Orde Baru* (Latif dan Ibrahim, ed.). Bandung: Mizan.
- Kress, Gunther. (1984). “Linguistic and Ideological Transformations in News Reporting” dalam *Language, Image, Media* (Davis & Walton, ed.). England: Basil Blackwell Publisher Limited.
- Lewuk, Peter. (1995). *Kritik Filosofis Atas Pembangunan, Beberapa Serpihan Pemikiran*. Jakarta: Posko’66.

- Muhadjir, Noeng. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi IV*. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- Mulyana, Deddy. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Rosdakarya.
- Nurudin. (2001). *Komunikasi Propaganda*. Bandung: Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. (1999). *Rekayasa Sosial, Reformasi atau Revolusi?*. Bandung: Rosdakarya.
- Skirritt, Ortrun Zuber (ed.). (1996). *New Directions in Action Research*. London: The Falmer Press.
- Sobur, Alex. (2001). *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Rosdakarya.
- Storey, John. (2003). *Teori Budaya dan Budaya Pop, Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies*. Yogyakarta: Qalam.
- Webb, Graham. (1996). "Becoming Critical of Action Research for Development" dalam *New Directions in Action Research* (Skirritt, ed.). London: The Falmer Press.

Dadang S. Anshori, dosen Universitas Pendidikan Indonesia, sedang menyelesaikan program S2 Ilmu Komunikasi di Pascasarjana Unpad Bandung.